

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN GANTI RUGI
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENOLAKAN
PENDAFTARAN TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 7/Pdt.G/2024/Pn.Pwt)**

**Oleh :
DEVI AWALIYAH
E1A021022**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya tindakan penolakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas selaku Tergugat yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir kriterium perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ganti rugi dan bentuk ganti kerugian yang harus dipenuhi terhadap penggugat oleh perbuatan tergugat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Data bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim belum secara jelas mempertimbangkan kriterium perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Penulis berpendapat bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi kriterium melanggar hak subyektif orang lain yakni BPN telah melanggar hak milik penggugat atas tanahnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1). Pertimbangan hakim juga tidak menyebutkan dan menjelaskan dalam mengabulkan ganti rugi dan bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat meliputi apa saja, mengingat kerugian materiil sebesar 1 milyar dan immateriil yang didalilkan penggugat akibat kesalahan tergugat tidak dikabulkan.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penolakan Pendaftaran Tanah, Ganti Rugi.

**URIDICAL ANALYSIS OF COMPENSATION CLAIMS DUE TO
UNLAWFUL ACTS ARISING FROM THE REFUSAL OF LAND
REGISTRATION BY THE LAND AGENCY**

(A Study of Court Decision Number 7/Pdt.G/2024/PnPwt)

By:

DEVI AWALIYAH

E1A021022

ABSTRACT

This research is motivated by the refusal of land registration carried out by the Head of the National Land Agency of Banyumas Regency as the Defendant, who is stated to have committed an Unlawful Act regarding the land registration application submitted by the Plaintiff. This study aims to analyze the legal considerations of the judge in qualifying the criteria for the unlawful acts committed by the defendant and to analyze the legal considerations of the judge in qualifying the form of compensation that must be provided to the plaintiff by the defendant's actions. This research employs a normative juridical approach with a prescriptive analytical research specification. The data is sourced from secondary data. Data collection is conducted through literature study, using qualitative normative analysis methods.

Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the panel of judges has not clearly considered the criteria for the unlawful acts committed by the defendant. The author argues that the defendant has committed an unlawful act and meets the criteria of being contrary to his own legal obligations based on Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law Article 19 paragraph (1) and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration Article 37 paragraph (1). The panel of judges also did not clearly explain in their consideration that the form of compensation resulting from unlawful acts could include anything, considering that material and immaterial losses of 1 billion were argued by the plaintiff as a result of the defendant's error were not granted.

Keywords : *Unlawful Acts, Land Registration Refusal, Compensation.*